



ANGGARAN

Pertahankan WTP

KEBERHASILAN Kabupaten Tabanan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam membenahi sektor pengelolaan anggaran tahun 2015 mendapat apresiasi berbagai kalangan termasuk anggota Dewan Tabanan. Namun, di balik keberhasilan yang diraih tersebut, masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk bisa ditingkatkan di tahun berikutnya. Seperti yang dilontarkan anggota Komisi III DPRD Tabanan **Gusti Ngurah Sanjaya**. Ia berharap apa yang telah dicapai Pemkab Tabanan dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada periode laporan keuangan tahun-tahun selanjutnya. "Pemberian opini tersebut merupakan wujud kinerja dan telah dilakukan pengauditan atas laporan keuangan sesuai dengan sistem dan prosedur pengauditan yang memadai," ujarnya, Jumat (12/6) kemarin. Sanjaya yang juga Dekan FE Unwar ini mengatakan yang tidak kalah pentingnya apakah pelaksanaan telah sesuai secara keseluruhan menunjukkan realita alokasi anggaran yang telah dilaksanakan Pemda?



Ia pun memberikan masukan pada Pemda agar di tahun anggaran berikutnya yang sangat perlu diperbaiki adalah perimbangan/rasio yang mendekati seimbang antara belanja langsung dengan tidak langsung, karena realita pembangunan bisa ditinjau dan dievaluasi dari rasio belanja tersebut. "Jika tidak seimbang atau kesenjangan rasio yang tinggi antara belanja langsung dengan tidak langsung pasti tidak terjadi keharmonisan pembangunan pemerintahan," ucapnya. Tak hanya itu, keseimbangan juga dipengaruhi oleh kualitas SDM yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian anggaran tersebut. (kmb28)

Edisi : Sabtu, 13 Juni 2015

Hal : 19



Ditenggarai Bodong, Lima Tower

Beroperasi di Dua Kecamatan

Tabanan (Bali Post) -

Belakangan ditenggarai banyak tower operator seluler yang belum berizin beroperasi di wilayah Tabanan. Apalagi kini banyak operator seluler menyiasati dengan mendirikan di atas gedung tinggi atau pertokoan bertingkat. Untuk memastikan tower-tower operator seluler tersebut berizin atau tidak, Satpol PP Tabanan bersama Dinas Perhubungan dan Kominfo Tabanan menyidik lima menara yang dicurigai tidak memiliki izin di Kecamatan Tabanan dan Kediri.

“Dari lima tower yang kami sasar tersebut memang belum bisa ditemukan legalitasnya, karena pemilik tidak ada di tempat. Jadi kami belum tahu apakah tower tersebut sudah ada izinnya atau belum,” ujar Kepala Satpol PP Tabanan Wayan Sarba, Jumat (12/6)

kemarin.

Jika memang lima tower ini benar-benar tidak bisa menunjukkan dokumen legalitasnya, Sarba menegaskan pengelola telah melanggar Perda No 1/2012 tentang pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi. Kelima tower tersebut berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kediri, milik Protelindo yang berdiri di tanah milik dari Arif dan baru tahap pembangunan. Kemudian ada juga di Banjar Pilisan, Kabakaba, Kediri, tower seluler milik Protelindo yang merupakan operator XL. Tower tersebut diketahui berdiri di atas bangunan milik I Wayan Marka dan sudah beroperasi tiga tahun. Lokasi ketiga di Desa Nyanyi, Kediri di atas tanah milik I Ketut Mandia. Tower yang disidak juga milik Protelindo yang merupakan operator XL juga. Lokasi keempat masih

di Kediri, yaitu di Banjar Mal-mundeh, Pandak Bandung. Di lokasi ini, pembangunan tower dikamufase dengan talang air sehingga sempat mengelabui petugas. Lokasi terakhir di Banjar Sakenan Belodan, Desa Delod Peken, Tabanan. Tower tersebut berdiri di atas bangunan milik I Made Suarmaya, milik operator Smartfren dan sudah beroperasi hampir 6 tahun. Pihak pemilik tanah yang disewa operator tersebut mengaku tidak mengetahui tentang adanya izin bangunan tersebut.

Dihubungi terpisah Kadishub Tabanan Made Agus Hartawiguna mengakui kelima tower tersebut belum mengajukan rekomendasi izin ke kantornya. Pasalnya, untuk pengurusan izin seperti IMB harus didasari dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dishub. (kmb28)



Bali Post/kmb28

TOWER - Satpol PP mengecek tower seluler yang ditenggarai belum mengantongi izin di dua kecamatan di Kabupaten Tabanan.

Edisi : Sabtu, 13 Juni 2015
Hal : 9



Dugaan Penyimpangan Perjalanan Dinas Sekwan Denpasar Diperiksa Kejari

Denpasar (Bali Post) -

Pemeriksaan saksi-saksi atas dugaan penyimpangan perjalanan dinas di Kota Denpasar, terus didalami penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar. Kamis (11/6), Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Denpasar I G.N. Rai Suta dipanggil guna menjalani pemeriksaan. "Dia dipanggil terkait perjalanan dinas. Yang bersangkutan sedang diperiksa di atas," ujar Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir di sela-sela

pemeriksaan.

Rai Suta tiba pukul 10.00 Wita dan baru pulang sekitar pukul 13.30 Wita. Jaksa penyidik yang memeriksa adalah Luga Harianto. Informasi di kejaksaan, untuk memperdalam perkara ini, para saksi diperiksa oleh lima orang, yakni Syahrir Sagir, Luga Harianto, Lumisensi, Kadek Wira dan Ari Suparma.

Apakah sekwan akan diperiksa kembali setelah pemeriksaan ini? Pihak Kejari

Denpasar menyatakan, Sekwan akan dimintai keterangan lanjutan. Hanya saja, soal waktu masih disesuaikan. Rai Suta dimintai keterangan dalam perannya sebagai Pengguna Anggaran (PA). Ia pun dimintai keterangan seputar proses pengamprahan dan tugasnya sebagai pengguna anggaran. Sekwan ini disebut-sebut mengetahui persis soal anggaran, termasuk dana yang digunakan dalam perjalanan dinas. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 13 Juni 2015

3

Hal

:



Pemkab Gagal Raih Pemasukan dari PLTS

Bangli (Bali Post) -

Dua unit panel pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang ada di Dusun Bangklet, Desa Kayubihi Bangli kini sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Ini dikarenakan dua unit panel tersebut mengalami kerusakan akibat pengembunan. Kabag Sumber Daya Alam (SDA) Setda Bangli Made Ari Pulasari, Jumat (12/6) kemarin mengakui hal tersebut. Dia mengatakan, kerusakan dua unit panel PLTS tersebut terjadi sudah sejak sebulan lalu.

“Dari total 200-an panel yang ada, dua mengalami kerusakan karena pengembunan. Ini terjadi sudah sejak sebulan lalu,” ujarnya. Meski sudah cukup lama, namun pihaknya mengaku belum bisa melakukan perbaikan terhadap panel PLTS tersebut. Selain karena masa garansinya sudah habis, Pemkab Bangli juga belum bisa melakukan perbaikan lantaran status PLTS terse-

but masih milik Pemerintah Pusat dan belum diserahkan ke Pemkab Bangli.

Dikatakan Ari Pulasari, setelah nantinya PLTS tersebut diserahkan ke Pemkab Bangli barulah pihaknya bisa melakukan perbaikan. Untuk melakukan perbaikan terhadap dua unit panel PLTS tersebut Pemkab Bangli akan meminta bantuan Universitas Gajah Mada (UGM). Ini

dikarenakan antara Pemkab Bangli dengan UGM selama ini sudah melakukan kerja sama dalam beberapa bidang salah satunya bidang energi. “Sekarang belum bisa kami perbaiki. Nanti begitu diserahkan kami akan perbaiki dengan meminta bantuan UGM,” ujarnya.

Disinggung mengenai kapan kira-kira PLTS tersebut diserahkan pusat, mantan

Kabag Humas ini mengaku belum tahu secara pasti. Hanya saja Ari Pulasari mengakui bahwa belum lama ini Pemkab Bangli sudah sempat melakukan pertemuan dengan pihak pusat untuk membicarakan hal itu. “Kapan akan diserahkan, kami belum tahu. Kami menunggu pusat,” ujarnya.

Seperti yang diberitakan selama ini, sejak diresmikan 2013 lalu Pemkab Bangli belum bisa mengoperasionalkan PLTS tersebut karena proses administrasi hibahnya masih bergulir di Kementerian ESDM. Pemkab hanya bisa melakukan pemeliharaan dengan membersihkan rumput-rumput

liar yang ada di sekeliling panel. Karena tidak disiapkan anggaran khusus pemeliharaan, untuk pembersihannya Pemkab Bangli terpaksa melibatkan pegawai untuk gotong royong.

Sejak diresmikan, keberadaan PLTS Bangklet digadang-gadang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan dalam APBD Induk 2014, Dinas Pendapatan (Dispenda) Bangli sempat memasang target pendapatan dari PLTS itu senilai Rp 1 miliar. Tetapi karena belum bisa dimanfaatkan, dalam perubahan target tersebut terpaksa ditarik kembali. (kmb40)

Edisi : Sabtu, 13 Jun 2015

Hal : 18



Perkara PDAM Karangasem Segera Tetapkan Tersangka

Denpasar (Bali Post) -

Pemeriksaan sejumlah pejabat sudah dilakukan terkait dugaan *mark-up* pengadaan tanah untuk PDAM Karangasem. Bahkan, informasi yang diterima di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Jumat (12/6) kemarin, status kasus ini segera naik menjadi penyidikan. Hanya saja, untuk menetapkan tersangkanya akan dilakukan ekspose terlebih dahulu. "Kalau soal sambungan PDAM, kerugiannya kecil. Soal pengadaan lahan ini yang besar," sebut salah seorang petugas di sela-sela pertandingan olahraga antarjaksa di seluruh Bali.

Kasidik Pidsus Kejati Bali, Akmal Kodrat tidak membantah informasi tersebut. "Ya, untuk menetapkan tersangkanya tinggal menunggu ekspose saja," jelasnya di sela-sela rangkaian perayaan HUT Adyaksa di Kejati Bali.

Pada saat pihak kejaksaan membidik sejumlah kasus baru seperti kasus Undiksa Singaraja yang sudah menetapkan tersangka dan kasus reklame di Denpasar yang masih intensif dikembangkan, banyak dipertanyakan soal kasus-kasus lama. Pihak

Kejaksaan Tinggi sebelumnya telah memberikan informasi bahwa sejumlah kasus yang tergolong besar dan melibatkan mantan pejabat telah menetapkan tersangka.

Hanya saja, kasus-kasus tersebut hingga saat ini belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar dengan dalih bahwa pihak penyidik masih menunggu hasil audit BPKP. Salah satunya kasus reklame Bandara Internasional Ngurah Rai yang telah menetapkan dua pejabat dan satu rekanan sebagai tersangka, tidak akan didiamkan

Edisi : Sabtu, 13 Juni 2015

Hal : 3



begitu saja. "Untuk bandara, nunggu BPKP," sebut Akmal Kodrat, kemarin.

Pernyataan Kodrat itu sama dengan keterangan mantan Aspidsus Putu Gede Sudharma yang sekarang dipercaya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samarinda. Begitu juga kasus lainnya seperti IHDN dan Stitna/Stikes Jembrana. "Ini masih pemberkasan," katanya meyakinkan.

Sebagaimana diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Bali belum ada merampungkan berkas perkara korupsi pada tahun 2015 ini. Padahal, sejumlah perkara sudah menetapkan tersangka pasca-dilakukan ekspose. Perkara-perkara yang masih dalam tunggakan pidsus itu, di antaranya kasus pembebasan lahan Jalan Prof. Ida Bagus Mantra. Perkara ini sudah menetapkan Wb sebagai tersangka dan oknum notaris yang sedang dibidik karena sempat dinilai kurang

proaktif.

Selain itu, kasus dugaan korupsi reklame di Bandara Internasional Ngurah Rai. Kasus ini tergolong besar karena pihak kejaksaan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Dua dari tiga tersangka adalah orang penting di bandara, yakni tersangka Purwanto yang mantan GM Bandara Ngurah Rai, Nursapto yang merupakan mantan Marketing Komersial Bandara Ngurah Rai Bali yang kini dikabarkan menjadi GM bandara di salah satu tempat di Indonesia, dan juga tersangka Chris Sridana selaku rekanan dari PT Penata Sarana Media (PSM). Di samping kasus bandara, kasus-kasus yang ditangani Kejati Bali yang sudah menetapkan tersangka, ada kasus Stitna/Stikes Jembrana. Ada juga dugaan korupsi dana punia di IHDN Denpasar yang sudah ada dua tersangka, yakni Prof. Titib dan Praptini. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 13 Juni 2015

Hal : 3